



# Pemda Buat Program

## KERAPU untuk Karimata

**SUKADANA** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara membuat salah satu upaya inovatif yang mereka beri nama KERAPU untuk konvergensi program pembangunan di Kepulauan Karimata. Semua mereka mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pembangunan di kepulauan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara, Tasfirani, belum lama ini

"Upaya inovatif ini diberi branding *KERAPU Ok, Karimata maju*," terangnya. KERAPU yang dimaksud dia adalah akronim dari Konvergensi Program Pembangunan.

Untuk langkah strategis, diakui Tasfirani, membangun sinergitas dengan *stakeholders*, khususnya Pemda, BKSDA, BPKH, Dinas Kelautan, dan Pemda Provinsi Kalimantan Barat, bahkan kementerian lembaga. Kedua, mereka menyusun perencanaan tematik, yakni perencanaan *landscape* Kepulauan Karimata bersama *stakeholder* utama. Ketiga, menyusun rencana aksi pembangunan Kepulauan Karimata bersama *stakeholder* utama. Keempat, diseminasi dan sosialisasi rencana aksi pembangunan Kepulauan Karimata. Kelima, membangun komitmen bersama untuk implementasi dengan mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan masing-masing *stakeholders*. Keenam, ekspose perencanaan *landscape* dan rencana aksi

pembangunan Kepulauan Karimata ke Bappenas, kemenLHK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan, untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan Kepulauan Karimata.

"Harapannya, konvergensi program pembangunan Kepulauan Karimata dapat terwujud, yang ditandai dengan integrasi program dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga kepulauan karimata maju, Masyarakat Kepulauan Karimata Sejahtera, Kabupaten Kayong Utara Maju," harapnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sebelumnya mengaku kesulitan melakukan intervensi pembangunan di daerah Kepulauan Karimata. Hal ini disebabkan sebagian besar daerah Kecamatan Kepulauan Karimata masuk di dalam kawasan Cagar Alam Laut (CAL) yang dilindungi. Sehingga, bila dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kayong Utara, Kecamatan Kepulauan Karimata masih jauh tertinggal. "Terisolir dan terpencil karena letaknya yang sangat jauh dan akses yang sulit. sulit berkembang, karena selain jauh, aksesnya sulit, juga karena berada didalam kawasan konservasi," ungkap Tasfirani.

Dari tiga desa yang berada di Kecamatan Kepulauan Karimata, diakui Tasfirani, hanya satu desa yang dapat tersentuh program pembangunan fisik, yaitu Desa Pelapis. Sedangkan Desa Padang dan Desa Be-





tok, menurutnya, masuk di dalam kawasan konservasi suaka alam.

“Setiap usulan program pembangunan, baik melalui teknokratis, Musrenbang, reses anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, tidak bisa direalisasikan, karena benturan dengan kewenangan,” keluhnya.

Selain itu, diakui Tasfirani, program pembangunan yang dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) selaku pengelola kawasan cagar alam laut dan hutan lindung, tidak selaras dengan arah kebijakan dan program pembabgunan pemerintah

Kabupaten Kayong Utara. “Padahal secara administrasi kepulauan karimata berada dalam wilayah kabupaten Kayong Utara. secara hukum, Pemda KKU (Kayong Utara) berkewajiban memenuhi hak pelayanan kepada masyarakat Kepulauan Karimata termasuk Desa Betok dan Padang,” tegasnya.

Sehingga, salah satu upaya pemerintah daerah, dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Karimata ialah dengan melakukan akselerasi pembangunan Kepulauan Karimata. Mereka melakukakn pengselarasan program pembangunan Kepulauan Karimata, se-

cara kolaboratif dan gotong royong, bersama-sama memusatkan perhatian dan konsentrasi dalam membangun Kepulauan Karimata.

Diketahui, Kepulauan Karimata merupakan satu dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara yang mana Kepulauan Karimata memiliki luas wilayah sekitar 282,97 kilometer persegi, memiliki 83 pulau besar dan kecil, sembilan pulau berpenghuni, dan sisanya tidak berpenghuni. Hampir dua pertiga wilayahnya berada dalam kawasan konservasi, 190.800 hektare kawasan konservasi cagar alam laut dan 18.313,91 hektare ka-

wasan hutan lindung. Secara geografis, Kecamatan Kepulauan Karimata terletak 127 kilometer sebelah utara ibu kota Kabupaten Sukadana, satu satunya akses menuju kesana adalah melalui laut.

“Jika menggunakan *speedboat* bermesin 500 PK, ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 - 4 jam dan jika menggunakan Kapal Banawa yang merupakan kendaraan reguler menuju kepulauan karimata, bisa ditempuh dalam waktu 8 - 9 jam, itu pun tergantung kondisi cuaca,” tutur Tasfirani.

Namun, daerah Kepulauan Karimata yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan daratan ini

memiliki kekayaan hasil laut yang melimpah, khususnya ikan karang/ikan kerapu, yang memiliki harga jual yang tinggi karena masuk dalam kategori ikan ekspor.

“Sementara potensi yang dimiliki luar biasa, ekosistem alam lautnya, flora dan fauna, pantai dengan pasir putihnya, ikan dengan berbagai jenis, termasuk jenis ikan-ikan yang menjadi primadona yaitu ikan kerapu. Terisolir dan terpencil karena letaknya yang sangat jauh dan akses yang sulit, sulit berekembang, karena selain jauh, aksesnya sulit, juga karena berada di dalam kawasan konservasi,” ungkapnya. **(dan)**





**PANEN HASIL LAUT:** Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan bersama istri, Erlina, saat memanen budidaya hasil laut di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Minggu (6/11) lalu.

DAMANG PRASETIO /PONTIANAK POST